

**LAPORAN HASIL PARTISIPASI DELRI
PADA PERTEMUAN G20 INVESTMENT AND INFRASTRUCTURE WORKING GROUP
DI MEXICO CITY, TANGGAL 6 –7 FEBRUARI 2014**

PENDAHULUAN

1. Pertemuan pertama kelompok kerja Investment and Infrastructure Working Group (IIWG) G20 di bawah Presidensi Australia tahun 2014 dilaksanakan di Mexico City dan dipimpin secara bersama-sama oleh tiga negara co-chairs: Meksiko, Jerman dan Indonesia. Pertemuan IIWG ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh negara anggota G20, tiga dari enam negara undangan (Spanyol, Singapura dan Selandia Baru), serta dihadiri oleh perwakilan IMF, Bank Dunia, OECD, FSB, dan G24. Delegasi Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Kedutaan Besar Indonesia di Meksiko, dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, dengan anggota delegasi berasal dari pejabat PKPPIM BKF (Kepala PKPPIM, Kepala Bidang Forum G20, dan Kasubbid Makroekonomi G20).
2. Agenda utama IIWG yaitu membahas empat usulan workstream yang diajukan oleh negara co-chairs dan Presidensi Australia (terlampir), yaitu *sound investment climate*, *intermediation of global savings*, *optimal MDBs resources*, dan *project planning and prioritization*. Pertemuan pertama ini juga mempertimbangkan sejumlah area kebijakan pembangunan yang dapat mendorong peningkatan peran sektor swasta dalam pembiayaan investasi infrastruktur serta usaha kecil dan menengah. Adapun target dari pelaksanaan pertemuan tersebut yaitu mendapatkan masukan dari seluruh negara anggota terhadap keempat keempat workstream tersebut di atas.
3. Dalam upaya mencapai tujuan pelaksanaan program kerja IIWG, *co-chairs* menyampaikan usulan pembagian kerja IIWG ke dalam empat *workstream* yaitu i) meningkatkan iklim investasi domestik (*co-chair* Meksiko), ii) intermediasi global private savings (*co-chair* Jerman), iii) pendekatan baru dalam mengoptimalkan peran Multilateral Development Banks (*co-chair* Meksiko dan Jerman), dan iv) meningkatkan proses dan transparansi perencanaan dan prioritasasi dan strukturisasi investasi proyek yang bankable, terutama untuk Public-Private Partnerships (PPP) (*co-chair* Indonesia). Dalam hal ini, seluruh sesi pertemuan dipimpin oleh masing-masing co-chair yang bertanggung jawab sesuai workstream, termasuk Indonesia yang memimpin jalannya pertemuan membahas workstream keempat mengenai mekanisme penyiapan dan prioritasasi proyek infrastruktur, khususnya pelaksanaan mekanisme kerja sama publik dan swasta (PPP).
4. Australia selaku Presidensi G20 tahun 2014 memberikan dukungan penuh untuk pemenuhan seluruh target program kerja IIWG. Dalam hal ini, Australia mengharapkan agar program kerja IIWG dapat menghasilkan *concrete deliverables* sebagai rekomendasi utama di bidang investasi dan infrastruktur untuk diajukan kepada KTT G20 di Brisbane pada bulan November 2014 mendatang. Capaian dari IIWG ini diharapkan akan mendukung upaya G20 dalam merumuskan komitmen kebijakan dan strategi dalam mendorong produktifitas dan mendukung pertumbuhan global di masa mendatang. Australia juga meminta kepada co-chairs dan seluruh negara anggota agar dapat menyiapkan usulan program kerja dan target outcomes untuk dimintakan persetujuan dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 saat pertemuan mereka di Sydney Australia tanggal 22-23 Februari.

PEMBAHASAN DAN HASIL-HASIL SIDANG

5. Pada pembahasan *workstream* pertama terkait isu iklim investasi, negara-negara anggota G20 sepakat pentingnya diidentifikasi penerapan kebijakan dari negara anggota baik yang bersifat individual maupun tindakan kolektif dalam mendukung lingkungan dan iklim usaha yang mendorong kepada upaya fasilitasi peningkatan investasi oleh sektor swasta. Dengan membangun dan meningkatkan iklim investasi domestik yang baik, negara anggota G20 akan mampu merumuskan satu strategi pertumbuhan ekonomi global yang kolektif terutama pada saat ekonomi global mengalami masa transisi ke pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dalam jangka pendek dan jangka menengah panjang. Disamping itu, individual action ini juga dapat dijadikan pengalaman good practice oleh negara lain dalam pelaksanaan program kebijakan di bidang investasi dalam negeri. Dalam hal ini, dukungan pemerintah kepada keterlibatan sektor swasta merupakan faktor penting dalam membangun dan meningkatkan iklim investasi domestik suatu negara.
6. Dalam sesi yang sama, negara-negara anggota G20 juga menyampaikan apresiasi dari manfaat hasil kerja G20 Study Group on Financing for Investment (SGFI) yang diketuai oleh Indonesia dan Jerman selama masa Presidensi Rusia 2013. Hasil kerja utama dari SGFI ini menyoroti peran fundamental dari pemerintah di dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk terciptanya peningkatan peran sektor swasta dalam investasi. Salah satu hasil penting dari SGFI yaitu upaya seluruh negara anggota untuk menyampaikan kebijakan dalam negeri masing-masing terkait investasi infrastruktur serta interaksi yang kuat dengan stakeholders dari G20 dalam memberikan kontribusi besar kepada perumusan kajian SGFI.
7. Beberapa negara telah menyampaikan pandangan dalam pembahasan isu iklim investasi tersebut. Italia menyampaikan pentingnya peran pemerintah di dalam peningkatan kualitas regulasi dan transparansi aturan investasi. Kepastian usaha menjadi salah satu kunci utama menjaga tingkat investasi tinggi dalam jangka panjang. Sementara Jepang menyampaikan bahwa investasi merupakan kunci utama untuk mendukung strategi pertumbuhan yang dirumuskan dalam FWG untuk Brisbane Summit nanti. Jepang berpandangan bahwa perlakuan pemerintah di bidang perpajakan memberi pengaruh sangat besar terkait peningkatan tabungan dalam negeri yang pada akhirnya menjadi sumber pendanaan korporasi untuk pembiayaan investasi ekonomi. Jepang menyampaikan bahwa setiap negara akan harus memilih antara kebijakan meningkatkan tabungan swasta atau mengakumulasi tabungan pemerintah untuk mendukung investasi, karena kedua hal ini akan menuntut penentuan prioritas yang berbeda.
8. Sejumlah negara juga mengkaitkan pembahasan iklim investasi dengan kondisi makroekonomi negara dalam mendukung strategi pertumbuhan. Dalam pandangan Brasil, peningkatan kapasitas formulasi regulasi dan tata kelola pemerintahan akan membantu meningkatkan iklim investasi. Bagi negara berkembang hal ini dapat dicapai dengan mempedomani rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi oleh FSAP atau lembaga lain. IIWG diminta bisa merujuk hasil-hasil evaluasi ini sebagai referensi untuk perumusan program kerja dan output ke depan. Sementara itu, Bank Dunia meminta agar fokus pembahasan dari IIWG dapat dipersempit/ pertajam dengan menghindari beberapa kemungkinan duplikasi dengan kelompok kerja lain, seperti di area pembiayaan UKM agar tidak bentrok dengan program kerja dari GPFI (Global Partnership for Financial Inclusion). Pandangan Bank Dunia ini didukung oleh ECB dan Argentina agar penggunaan sumber daya untuk pembahasan agenda di IIWG dapat lebih efisien dengan menghindari duplikasi kerja.
9. Dalam kesempatan tersebut, Amerika Serikat menyampaikan pandangan bahwa meskipun saat ini masih terjadi krisis ekonomi dan perlambatan pertumbuhan

secara global, kegiatan ekonomi harus tetap berjalan dengan baik. Oleh karenanya penting sekali agar hasil kerja dari IIWG tidak hanya menyoroti masalah kuantitas investasi yang dilaksanakan, namun terutama upaya peningkatan kualitas investasi itu sendiri. Sementara itu, Inggris menyatakan bahwa masih banyak hal-hal yang harus dilakukan masing-masing negara anggota termasuk melalui sharing pengalaman *best practice* yang telah diterapkan dan sukses untuk dapat menjadi panduan dan contoh bagi negara lainnya. Indonesia juga menyatakan kesepakatan untuk adanya *best practice* sebagai *guidance* bagi negara anggota. Namun demikian dalam mencapai pertumbuhan melalui investasi, kiranya masing-masing negara tidak menerapkan kebijakan publik yang dapat menimbulkan persaingan antar negara seperti penerapan *tax incentive* yang tidak tepat.

10. Meksiko selaku co-chair menyampaikan perlu adanya *best practice* dan *guidance* sehingga terdapat panduan yang jelas dalam upaya meningkatkan investasi infrastruktur. Selain itu, Meksiko juga menyatakan perlu adanya template sebagai wadah menuangkan komitmen bagi setiap negara anggota dan komitmen tersebut kiranya dapat dimonitor dan konkrit. Untuk lebih meningkatkan deliverable IIWG, Australia menyatakan perlunya koordinasi dan collective action antar working group sehingga dapat mengatasi overlap fokus diskusi yang terjadi.
11. Sementara itu OECD menyampaikan bahwa terdapat kompleksitas dan saling keterkaitan yang kuat antar *workstream* di IIWG dan faktor utama dalam membangun iklim investasi yang baik adalah regulasi yang stabil sehingga dapat menunjang pembiayaan investasi tersebut. OECD juga menyampaikan perlu ditingkatkan pertemuan sektor keuangan secara lebih regular untuk meningkatkan dialog investasi melalui inisiasi *Financial Stability Board* (FSB) serta melakukan survey untuk mengidentifikasi instrumen keuangan yang tepat dalam investasi infrastruktur. Menanggapi hal tersebut, FSB telah mengeluarkan sejumlah paper terkait dengan keterlibatan private sector dan mengharapkan *feedback* dari IIWG.
12. Untuk menindaklanjuti workstream pertama ini, negara anggota G20 sepakat untuk melakukan langkah-langkah sebelum pertemuan IIWG berikutnya pada bulan Maret 2014, yaitu:
 - Penyampaian *timeline* mengenai tata cara dan batas waktu pengajuan awal *country individual actions*, proses *peer review* oleh negara anggota, dan *outcome final* yang akan diajukan ke level Menteri dan *Leaders*.
 - Penyampaian usulan format atau *template* panduan negara anggota dalam menyampaikan *country submission* yang konsisten dan tidak tumpang tindih dengan template *country submission* (MAP) yang dilaksanakan oleh FWG.
 - Penyampaian segera paper mengenai proses pelaksanaan *peer review* oleh negara anggota terkait kebijakan investasi di negara anggota yang lain.
 - Setiap penyampaian komitmen terdahulu dari negara anggota akan dievaluasi oleh Bank Dunia dan akan menjadi penentu komitmen setiap negara sebagai dasar pengembangan dari hasil kerja SGFI sebelumnya.
13. Dalam pembahasan sesi selanjutnya mengenai intermediasi sumber pendanaan global (*intermediation of global saving*), negara anggota G20 menyepakati adanya relevansi tinggi antara regulasi keuangan yang prudent dan dukungan yang luas pada reformasi regulasi keuangan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, negara-negara anggota G20 sepakat pentingnya sumber-sumber pendanaan global disalurkan secara efektif dan efisien kedalam investasi infrastruktur dan pembiayaan UKM.
14. Negara anggota sepakat bahwa reformasi regulasi yang saat ini dibangun dan dilaksanakan oleh FSB dan organisasi internasional saat ini cukup relevan, termasuk mekanisme monitoring dampak negatif (*unintended*) dari pelaksanaan reformasi regulasi global. Selanjutnya, terdapat kesepahaman di antara negara anggota bahwa ketersediaan informasi menjadi elemen utama bagi pasar dalam

melaksanakan fungsi intermediasi pembiayaan infrastruktur dan sebaliknya kurangnya informasi akan mengurangi kesiapan investor swasta untuk terlibat dan mengakibatkan premi risiko yang lebih tinggi untuk mengkompensasi ketidakpastian. Terhadap hal ini, pilihan untuk meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi akan menjadi area utama yang akan ditindaklanjuti. Selain itu, pentingnya standarisasi dalam meningkatkan channelling sumber pembiayaan melalui intermediasi pasar membuat negara anggota G20 merasa perlu untuk mengembangkan keuntungan ekonomi dari *securitization*.

15. IIWG juga menyoroti beberapa inovasi instrumen pembiayaan non konvensional seperti pembiayaan Islamic sukuk untuk dilakukan kajian lebih mendalam dan dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan. Untuk ini diharapkan IMF bersama Bank Dunia dan bank pembangunan lainnya dapat melakukan analisis dan kolaborasi untuk mendapatkan pemahaman lebih termasuk perkembangan pelaksanaan instrumen keuangan sejenis saat ini.
16. Pada sesi tersebut, Inggris mendukung pelaksanaan workstream kedua tersebut dengan menyatakan area intermediasi *global savings* dapat memberikan keuntungan nyata bagi negara anggota meskipun terdapat tantangan dalam mengatasi ketersediaan data dan transparansi. Indonesia menyampaikan perlunya melakukan analisa yang tepat kepada pengembangan instrumen keuangan yang prudent dan juga hendaknya investment rating dilakukan secara transparan dan baik karena akan berdampak kepada berkurangnya tingkat investasi di suatu negara selain dari kebijakan makroekonomi dan stabilitas kebijakan pemerintah.
17. Beberapa negara anggota juga menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan *securitization* dengan meningkatkan transparansi informasi namun dengan berbagai konsekuensi yang harus dilakukan. Italia dan Brasil menyatakan untuk dapat mengoptimalkan proses transparansi informasi, hendaknya IIWG mengadakan dialog pendapat dengan kalangan *institutional investors*. Di samping itu, beberapa negara juga menyoroti masalah mitigasi risiko terhadap nilai tukar mata uang di dalam mendorong pembiayaan investasi jangka panjang (*foreign exchange risks*). Spanyol memberikan pendapat bahwa masalah transparansi dapat diatasi dengan melakukan koordinasi antar negara anggota, sementara Turki selain menyatakan dukungan kepada peningkatan proses transparansi, juga menyampaikan bahwa peran bank domestik masih sangat penting disamping peran *institutional investors* pada negara-negara *Emerging Market Economies* (EMEs).
18. Singapura selaku negara undangan menyampaikan pengalamannya dalam pengelolaan instrumen pembiayaan investasi. Dalam hal ini, penting untuk dirumuskan mekanisme transfer pinjaman proyek pembiayaan investasi jangka panjang dari lembaga perbankan kepada *institutional investors*. Pengalaman negara tersebut membuktikan sulitnya proses transisi itu dilaksanakan, dan hendaknya terlebih dahulu dilakukan identifikasi proyek jangka panjang yang mendapatkan prioritas dapat dilakukan transisi pembiayaan tersebut. Selanjutnya, agar proses transisi berjalan dengan baik, jika terjadi financing gap, negara harus mempunyai mekanisme yang jelas dengan cara memberikan jaminan kepada *institutional investors* dan juga adanya transparansi informasi sehingga para investor mendapatkan akses kepada investasi tersebut.
19. Dalam kaitan yang sama, Jepang memandang pemerintah juga harus dapat melihat investasi dari sudut pandang investor, dimana faktor kebijakan makroekonomi dan regulasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan investasi jangka panjang. Untuk itu komunikasi dengan para investor menjadi hal yang sangat penting. Sementara itu, Kanada menyampaikan bahwa negara anggota harus mengerti *value chain project* dalam beberapa instrumen keuangan khusus agar dapat memfasilitasi investasi proyek *Brownfield* dan *Greenfield*.

20. Terkait isu terakhir yang diangkat oleh Kanada, beberapa organisasi internasional diantaranya Bank Dunia memberikan masukan bahwa proyek investasi *Brownfield* dan *Greenfield* dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan peluang kerja dan negara anggota. Namun demikian hendaknya negara tersebut dapat mengidentifikasi perbedaan-perbedaan proyek infrastruktur antara *advanced economies* dan *emerging markets*. Bank Dunia juga mengangkat isu *assessment* terhadap *value chain project* dalam investasi infrastruktur. IMF sepaham dengan Bank Dunia dalam *value chain project* dan harus ada *assessment* terhadap aliran risiko yang terjadi dan macam-macam risiko lainnya. IMF menyampaikan bahwa akan mendukung negara anggota melakukan *assessment* terhadap dampak dari regulasi yang tidak terduga bagi kelangsungan investasi jangka panjang dan melakukan pengembangan *securitization* untuk mencegah risiko yang terjadi. FSB juga akan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh negara anggota dan investor terkait dengan dampak reformasi regulasi dari elemen makro dan mikro. OECD juga menyarankan agar negara anggota G20 membangun instrumen keuangan yang baru untuk dapat mengantisipasi dampak dari reformasi regulasi keuangan global.
21. Akhir sesi kedua ini ditutup dengan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya:
- FSB akan memberikan data proyek yang mutakhir dan telah dibahas dengan IOs lainnya terkait dengan dampak dan konsekuensi reformasi regulasi keuangan terhadap investasi.
 - Kolaborasi antara IMF dan Bank Dunia dengan *development bank* lainnya akan melakukan pembaharuan dan pengawasan terhadap *securitization market*, terutama terkait dengan infrastruktur dan SME, termasuk dalam hal ini analisis lebih dalam terkait inovasi instrument pembiayaan non konvensional seperti Islamic Sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi ke depan.
22. Pada kesempatan berikutnya, negara anggota G20 menyepakati beberapa hal terkait dengan peningkatan peran MDBs dalam investasi infrastruktur. Output utama dalam sesi ini mencakup peran Bank Dunia dalam memfasilitasi investasi infrastruktur sangat penting mengingat potensi sumber daya yang dimiliki Bank Dunia. Co-chairs pada sesi ini meminta agar Bank Dunia dapat memberikan beberapa *update* terkait rencana restrukturisasi organisasi Bank Dunia pada pertemuan para Menteri G20 berikutnya bulan April 2014. Sementara itu negara anggota G20 juga diharapkan dapat memberikan pendapat dan hasil analisa maupun pengalaman dalam investasi yang dituangkan dalam suatu dokumen sehingga menghasilkan output yang konkrit untuk disampaikan dalam pertemuan Menteri Keuangan.
23. Beberapa negara anggota menyatakan bahwa MDB dapat mendukung proses investasi dengan berbagai metode. Amerika Serikat dan Kanada berpendapat pentingnya peran MDB untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek investasi seperti dengan mengirimkan tenaga ahli. Singapura juga melihat MDB perlu untuk fokus kepada proyek yang bankable dan dapat mengatasi perbedaan *interest rate of return* dalam investasi infrastruktur. Sementara itu, Brasil menganggap MDB harus meningkatkan kapasitasnya dan MDB diharapkan mengadakan studi lebih lanjut mengenai *securitizing on MDB assets* dan fokus kepada *middle income countries*.
24. Dalam kesempatan tersebut, Inggris mengharapkan MDB berpikiran lebih terbuka dengan menciptakan berbagai metode dalam peningkatan investasi dan menilai bahwa pemerintah harus mendukung *special purpose vehicle* (SPV) untuk mendorong dan memfasilitasi investasi publik dan swasta dengan meningkatkan efektifitas dan optimalisasi penggunaan MDBs yang ada dan sumber daya publik. Sedangkan Italia mengharapkan MDB dapat meningkatkan kapasitas pinjaman dan memberikan dukungan tenaga ahli untuk peningkatan investasi. Indonesia juga

mendukung peningkatan kapasitas pinjaman MDB dengan melakukan optimalisasi sumber daya yang ada dan perlu adanya perubahan kebijakan dalam MDB. Sementara Meksiko menambahkan perlunya peningkatan kerja sama antara MDB dan national development bank (NDB).

25. Menanggapi berbagai pendapat yang disampaikan oleh negara anggota G20, Bank Dunia menyatakan siap untuk mendalami kemungkinan pemberian bantuan teknis kepada negara yang secara kelayakan bisnis memiliki proyek investasi menarik namun memiliki keterbatasan di dalam penyiapan mekanisme mitigasi risiko investasi. Bank Dunia juga akan memberikan kontribusi untuk upaya peningkatan lingkungan investasi di negara anggota serta meningkatkan konsentrasi kepada *viable project*.
26. Diskusi mengenai peningkatan peran serta MDB dalam investasi infrastruktur menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya adalah mencari solusi meningkatkan efektifitas MDB, termasuk didalamnya mengenai bantuan modal. IIWG juga mendukung penuh Bank Dunia untuk meningkatkan bantuan tenaga ahli kepada peningkatan kapasitas penyiapan proyek investasi infrastruktur di negara berkembang. Bank Dunia juga akan memberikan laporan internal kepada MGM pada saat IMF/World Bank Spring Meeting bulan April, terutama terkait dengan berbagai opsi untuk memperbaiki *balance sheet* serta alternatif kerja sama dengan *Regional Development Banks* (RDBs).
27. Pada sesi terakhir terkait perumusan isu penyiapan, prioritasasi dan fasilitasi proyek infrastruktur dan PPP, Bapak Isa Rachamatarwata, selaku co-chair Indonesia, memimpin jalannya diskusi tersebut. Diskusi menghasilkan kesepakatan negara anggota agar lebih fokus kepada upaya saling membagi pengalaman dan pengetahuan tentang praktek sukses ataupun kegagalan di dalam pelaksanaan investasi infrastruktur pada negara masing-masing, terutama dalam hal perencanaan proyek, prioritasasi, dan *viable project*. Negara anggota juga mengharapkan partisipasi Bank Dunia untuk mengkoordinasi hasil dan pengalaman masing-masing negara anggota tersebut menjadi sebuah panduan *common practice* sehingga dapat berguna bagi IIWG dan juga *working group* lainnya.
28. Lebih jauh dibicarakan juga masalah krisis keuangan global telah membuat hambatan dan tantangan dalam menciptakan ruang lingkup investasi yang baik serta proyek yang bankable dan menarik bagi investor. Untuk mengatasi hal ini, Korea Selatan berpendapat bahwa PPP merupakan salah satu aksi nyata yang sangat relevan dan feasible untuk dapat meningkatkan investasi infrastruktur. PPP framework dapat menjadi deliverable utama yang dapat disampaikan pada pertemuan MGM dan KTT G20 di Brisbane. Untuk mencapai hal tersebut, Korea Selatan meminta komitmen dan kerja sama negara anggota untuk dapat menyampaikan hasil dari perkembangan investasi melalui PPP di masing-masing negara anggota. Perancis beranggapan bahwa pengalaman sukses implementasi PPP di Korea Selatan merupakan contoh yang sangat baik dan dapat diadopsi oleh negara lainnya. Selain itu, perlu adanya bantuan dari Bank Dunia terkait technical assistance dan koordinasi dengan Development Working Group agar tidak terjadi overlap terhadap program pada LICs.
29. Inggris menyampaikan bahwa pengalaman negara anggota berbeda dan tergantung dari kemampuan dan kebijakan dari masing-masing negara tersebut. Meski demikian, proposal yang diajukan Korea Selatan dapat di appreciate secara positif dan mengharapkan agar Bank Dunia dapat memfasilitasi agenda tersebut. Untuk itu, Inggris menawarkan untuk berperan aktif di dalam sharing pengalaman pelaksanaan proyek PPP dan menyampaikan pentingnya dibangun satu data base informasi proyek-proyek PPP yang dapat menarik partisipasi investor swasta. Sementara itu, G24 mempertanyakan adanya *assessment* lebih mendalam mengenai perbedaan

pengalaman masing-masing negara, bagaimana proses pengembangan PPP, dan bagaimana meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan PPP tersebut.

30. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala investasi infrastruktur, Australia menyampaikan bahwa PPP merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan transparansi dalam proyek-proyek investasi dan dapat diimplementasikan secara luas dan global. Oleh karena itu, untuk menghilangkan hambatan yang ada, kunci utamanya adalah perlunya memberikan kepastian bagi semua kalangan yang melakukan investasi infrastruktur. Brasil menerima dengan sangat baik usulan sharing pengetahuan dan pengalaman implementasi PPP dari negara anggota. Selanjutnya, Cina menegaskan pentingnya efisiensi dalam melakukan investasi dan peningkatan kualitas investasi itu sendiri. Hal ini didukung oleh IMF.
31. Bank Dunia menyampaikan bahwa kapasitas dalam menyiapkan proyek merupakan hambatan utama dalam investasi dan menilai pemilihan proyek yang bankable lebih penting dari persiapan proyek serta investor perlu mengetahui pipeline proyek pemerintah dimasa mendatang sehingga dapat merencanakan melakukan investasi dimasa mendatang. OECD berpendapat bahwa pengalaman PPP di forum APEC dapat memberikan kontribusi positif pada G20.
32. Pimpinan diskusi memberikan beberapa hasil pertemuan, yaitu:
 - Negara anggota sepakat membentuk inisiatif kebijakan untuk meningkatkan proses persiapan proyek, perencanaan dan prioritasasi, dan fasilitasi secara lebih luas dengan fokus kepada pengaturan PPP.
 - Negara anggota sepakat membangun panduan *practice principles* yang dapat memfasilitasi investasi sektor swasta.
 - Pemerintah diharapkan dapat menyusun pengaturan sinyal harga dan *risk sharing*, termasuk membuat metode standar.
 - Negara anggota memandang pentingnya ketersediaan informasi dan transparansi sehingga investor swasta dapat mengetahui dengan jelas risiko dan *expected return*.
 - IIWG akan mengikutsertakan kalangan bisnis dan investor internasional dalam pembahasan agenda investasi infrastruktur untuk mendapatkan pemahaman yang baik mengenai keterlibatan sektor swasta.

PERTEMUAN TERBATAS PRESIDENSI AUSTRALIA DAN CO-CHAIRS IIWG

33. Sebelum pelaksanaan pertemuan IIWG tersebut, Presidensi Australia dan Meksiko selaku tuan rumah telah berinisiatif mengundang pertemuan antara *co-chairs* yang bertujuan mempersiapkan rincian pertemuan IIWG tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut, co-chairs (Indonesia, Jerman dan Meksiko) serta Presidensi Australia menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
 - Penyusunan issues note untuk MGM Sydney dan draft komunike menteri akan disiapkan oleh Presidensi Australia bersama co-chairs sebelum diajukan kepada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (MGM) termasuk didalamnya usulan *output* yang akan disepakati dalam MGM nanti.
 - Presidensi Australia mengusulkan format pembahasan agenda investasi dan infrastruktur dalam bentuk working dinner yang hanya akan dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20. Dalam hal ini terdapat 56 Menteri dan Gubernur yang akan hadir dari negara anggota G20, dan akan dibagi menjadi 7 grup diskusi dimana setiap grup diskusi dipimpin oleh satu orang menteri fasilitator membahas agenda usulan IIWG.
 - Presidensi Australia meminta para Menteri Keuangan dari negara co-chairs (Indonesia, Jerman, dan Meksiko) agar bersedia menjadi fasilitator dalam pembahasan agenda saat working dinner tersebut, ditambah beberapa Menteri

Keuangan dari negara yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait investasi infrastruktur yang baik untuk dapat disampaikan kepada negara anggota lain.

- Pembahasan dalam IIWG diharapkan dapat memberikan masukan kepada Menteri dalam penyusunan strategi pertumbuhan ekonomi global ke depan dan diharapkan juga para Menteri akan memberikan *feedback* kepada IIWG.
- Pada pertemuan MGM di Sydney nanti, G20 akan mengadakan pertemuan khusus dengan B20 untuk mendapatkan input mengenai investasi infrastruktur yang sebaiknya dilakukan dari sudut pandang kalangan bisnis.

PENGAMATAN DAN TINDAK LANJUT

34. Dalam pengamatan Delri, seluruh negara anggota G20 memberikan perhatian dan dukungan kuat untuk perumusan rekomendasi di keempat workstream tersebut dan pentingnya memperoleh concrete deliverables bagi KTT G20 di Brisbane nanti. Di samping itu, negara anggota G20 secara aktif menyampaikan kontribusi positif kepada pembahasan agenda, terutama terkait isu intermediasi sumber pendanaan global kepada investasi infrastruktur dan peningkatan proses penyiapan dan restrukturisasi proyek-proyek investasi infrastruktur agar dapat menarik minat dan partisipasi investor swasta. G20 juga memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya negara anggota membuat dan menyampaikan *individual dan collective actions*. Aksi kolektif tersebut merupakan komponen kunci dalam meningkatkan strategi pertumbuhan yang komprehensif dan secara bersama dapat membantu perekonomian dunia menuju transisi pertumbuhan yang lebih kuat dalam jangka pendek dan menengah.
35. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan yang tajam di antara negara anggota G20 terkait beberapa isu, yaitu penekanan kebijakan investasi infrastruktur antara kuantitas dan kualitas/efisiensi pembiayaan, mekanisme evaluasi dampak reformasi regulasi keuangan global, dan upaya peningkatan peran Bank Pembangunan Global (MDBs) di dalam pembiayaan jangka panjang investasi infrastruktur. Dalam hal ini, beberapa negara seperti Amerika Serikat cenderung menginginkan penekanan kepada kualitas investasi dari pada kuantitas, sementara China dan sejumlah negara emerging market lain menginginkan keseimbangan di antara keduanya.
36. Sementara itu, terkait evaluasi dampak reformasi regulasi keuangan global, sebagian besar negara maju tidak sepakat adanya kompromi terkait regulasi global karena tujuannya sudah sangat jelas. Sementara negara emerging markets menginginkan agar mekanisme pembiayaan investasi jangka panjang juga mendapat perhatian besar, terutama beberapa hambatan yang diduga sebagai akibat dari implementasi standar-standar keuangan yang baru. Terakhir, sebagian besar negara maju juga berkeberatan untuk dibahas opsi kenaikan sumber pendanaan lembaga keuangan internasional. Posisi ini berseberangan dengan sebagian negara emerging markets, dimana kebutuhan pembiayaan investasi global yang semakin besar khususnya di proyek infrastruktur membawa konsekuensi kepada kebutuhan peningkatan sumber dana MDBs.
37. Dari beberapa hasil pertemuan pertama IIWG tersebut, Delri mencatat masih terdapat ruang lingkup yang cukup untuk meningkatkan intermediasi global savings untuk membiayai investasi jangka panjang dan menyediakan akses terhadap pembiayaan bagi SME. Selain itu, tampaknya ada tindakan yang berpotensi meningkatkan persiapan proyek, perencanaan, dan fasilitasi melalui PPP dan akan dieksplorasi lebih lanjut. Sedangkan peran utama MDB dan RDB perlu ditindaklanjuti mengingat peran sentral mereka dalam menunjang investasi seperti bantuan teknis, koordinasi, dan penyediaan data.

38. Sebagai salah satu co-chair IIWG, Indonesia juga akan menindaklanjuti hasil pembahasan pada pertemuan pertama IIWG ini kepada seluruh stakeholders terkait serta melakukan pendekatan lebih intensif kepada negara-negara anggota G20 yang lain untuk mendapatkan dukungan agar rekomendasi yang dihasilkan sebagai dasar penyusunan Brisbane Action Plan harus kongkrit dan membawa dampak positif kepada komitmen seluruh negara anggota G20 dalam mempertahankan momentum pertumbuhan global dalam jangka panjang.

-----00000-----